BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

UNIT PELAYANAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1. Sejarah Umum Instansi

Sejarah merupakan suatu peristiwa yang terjadi dimasa lalu yang sangat berpengaruh bagi kehidupan suatu bangsa, organisasi atau instansi pemerintah. Oleh karena itu banyak yang tahu suatu kejadian merupakan pedoman atau ilmu pengetahuan untuk generasi yang akan datang. Demikian pula yang terjadi di Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat mempunyai nilai-nila: historis yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga jaman, yaitu:

1. Zaman penjajahan Belanda
2. Zaman Penjajahan jepang
3. Zaman setelah kemerdekaan

Adapun sejarah pendirian dan perkembangan Dinas Bina Marga pada zaman penjajahan.

1. Zaman penjajahan belanda

Pada zaman penjajahan belanda DPU Bina Marga dikenal dengan sebutan "BOW" yaitu singkatan dari *BURGELIJK OPERTURE WALKEN*. Walaupun pada saat itu bangsa Indonesia sedang terjajah, tidak sedikit putera-puteri bangsa Indonesia yang ikut menjadi pelopor dalam mendirikan birokrasinya.

Dalam keadaan bangsa Indonesia terjajah, maka dalam hal gerakannya sangat terbatas dan sederhana serta pengabdiannya dimanfaatkan oleh bangsa Belanda untuk kepentingan bangsanya sendiri, misalnya: pembangunan jalan,

hasil perkebunan yang pelaksanaan tugasnya dengan menggunakan TKI melalui kerja paksa yang disebut "kerja rodi"

2. Zaman penjajahan jepang

Setelah Jepang mengalahkan Belanda maka berakhir pula seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang terkenal dengan kerja rodinya. Dengan kekalahan Belanda itu maka "BOW" berubah menjadi *"DOBUKO JIMUSO"* kemudian jepang merubah kebiasaan Belanda termasuk aparatur pemerintahannya dan dalam pelaksanaannya dititik beratkan kepada kerja paksa yang disebut *"ROMUSHA"* dengan adanya romusha ini, bangsa Indonesia lebih memprihatinkan lagi keadaanya dalam kehidupannya dibandingkan ketika dijajah Belanda.

3. Zaman setelah kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945.Bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Walaupun bangsa Indonesia telah merdeka, tidak berarti bangsa Indonesia bebas total tetapi masih banyak yang harus dibenahi dan dipertahankan supaya tidak terjajah kembalI.

Sejarah "BOW" dan *"DOBUKO JIMUSO"* dirubah namanya menjadi "PUTL" yang dikenal dengan sebutan Pekerjaan Umum dan tenaga listrik, yang menjadi pelopor kebangkitan Pekerjaan Umum yang ditetapkan pada tanggal 3 desember 1945.

Dengan semangat pengabdian pada negara PUTL mulai pengabdiannya dengan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada masyarakat demi membangun negara yang merdeka.

Dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa, pada saat itu pula warga PUTL disamping berjuang membela tanah air juga merupakan kantor jawatan pekerjaan umum daerah tingkat I Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1953 pemerintah mengeluarkan peraturan yang berisi tentang penyerahan tugas-tugas Pekerjaan Umum di Daerah Tingkat 1 Jawa Barat, yaitu jawatan otonomi.

Dengan adanya dekrit presiden 5 juli 1959, maka jawatan ini diberi nama Dinas Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Yang terletak di Daerah Tingkat 1 Jawa Barat dan langsung dibentuk susunan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945 yang berpedoman pada Pancasila. Ditahun 2000 Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dirubah namanya menjadi Dinas Bina Marga.

2.2. Struktur Organisasi Instansi

Struktur organisasi merupakan bentuk kerangka dari hubungan bidang kerja maupun tanggung jawab fungsional kepada unit-unit yang terkait dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas pada Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat struktur organisasi berbentuk garis, dimana kekuasaan dan tanggung jawab berurutan dari atas kebawah sesuai dengan tingkat tanggung jawab unit-unit terkait.

Struktur organisasi pada Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
   a. Sub Bagian Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub bagian Hukum da Tata Laksana

d. Sub bagian Umum

e. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :

1. Seksi Data dan Informasi
2. Seksi Penyusunan Program
3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
4. Seksi Pengujian Tanah dan bahan jalan

f. Sub Dinas Bina Teknik, terdiri dari :

1. Seksi Tata Teknik dan Bina Teknik
2. Seksi Perancangan
3. Seksi Pengujian Tanah dan bahan Jalan

g. Sub Dinas Pembangunan, terdiri dari :

1. Seksi Tata Teknik Pembangunan
2. Seksi Pembangunan Jalan
3. Seksi Pembangunan Jembatan

h. Sub Dinas Pemeliharaan, terdiri dari :

1. Seksi Tata Teknik Pemeliharaan
2. Seksi pemeliharaan jalan
3. Seksi Pemeliharaan Jembatan

i. Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan, terdiri dari :

1. Seksi Tata Teknik Pengawasan Pemanfaatan
2. Seksi Pengawasan Jalan

3. Seksi Pemanfaatan Jalan

Penyusunan struktur organisasi pada Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat dilakukan dengan pertimbangan bahwa Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat harus fleksibel dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa melakukan perubahan secara menyeluruh. Struktur organisasi harus menunjukan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas sehingga tidak terjadi *overlap* fungsi masing-masing bagian atau unit.

Bagan struktur organisasi Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat dapat dilihat pada lembar lampiran.

2.3. Deskripsi Jabatan Instansi

Tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang ada, disusun agar tidak terjadi penyimpangan didalam memberikan tugas pada bagian – bagian yang ada di dalam tubuh instansi. Adapun uraian tugas pada Dinas Bina Marga adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Memimpin, mengkoordinsikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Dinas.

2. Wakil Kepala Dinas

   Mengkoordinasikan perencanaan dan program, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.

3. Bagian Tata Usaha

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, tata laksana dan umum.

a. Sub Bagian Kepegawaian

Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

c. Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana

Menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketata laksanaan bidang kebinamargaan.

d. Sub Bagian Umum

Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas.

e. Sub Bagian Bina Program

Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis dibidang kebinamargaa, penyusunan program kerja dinas yang meliputi program pembangunan kebinamargaan dan rencana strategis Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dibidang kebinamargaan.

1. Seksi Data dan Informasi

   Mempersiapkan data dan informasi.

2. Seksi Penyusunan Program

   Mempersiapkan bahan pembinaan teknis pelaksanaan penyusunan program.

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Mempersiapkan bahan pembinaan teknis untuk evaluasi dan pelaporan.

f. Sub Dinas Bina Teknik

Merumuskan dan mengkaji bahan pembinaan teknis bidang tata teknik bina teknik, perancangan dan pengujian tanah dan bahan jalan.

1. Seksi Tata Teknik Bina Teknik

Menyusun bahan pembinaan teknis tata teknik bina teknik.

2. Seksi Perancangan

Menyusun bahan pembinaan perencanaan teknis jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.

3. Seksi Pengujian tanah dan bahan jalan

Menyusun bahan pembinaan teknis pelaksanaan pengujian tanah dan bahan jalan.

g. Sub Dinas Pembangunan

Merumuskan bahan penyelenggaraan teknis bidang tata teknik pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan penggantian jembatan.

1. Seksi Tata Teknik Pembangunan

Menyusun bahan penyelenggaraan dan petunjuk teknik pelaksanaan tata teknik pembangunan jalan dan jembatan.

2. Seksi Pembangunan Jalan

Menyusun bahan penyelengaraan teknik pelaksanaan pengawasan pembangunan dan penempatan jalan.

3. Seksi Pembangunan Jembatan

Menyusun bahan penyelenggaraan teknik pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan.

h. Sub Dinas Pemeliharaan

Merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan teknis bidang tata teknik pemeliharaan, pemeliharaan jalan dan pemeliharaan jembatan.

1. Seksi Tata Teknik Pemeliharaan

Menyusun bahan penyelenggaraan dan petunjuk teknik pelaksanaan tata teknik pemeliharaan jalan dan jembatan

2. Seksi Pemeliharaan Jalan

Menyusun bahan penyelenggaraan teknik pemeliharaan jalan

3. Seksi Pemeliharaan Jembatan

Menyusun bahan penyelenggaraan teknik pemeliharaan jembatan.

i. Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan

Merumuskan bahan pembinaan di bidang pengawasan pemanfaatan jalan

1. Seksi Tata Teknik Pengawasan Pemanfaatan

Menyusun bahan penyelenggaraan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tata teknik pengawasan pemanfaatan tata naskah perizinan dan petunjuk teknis pengawasan pemanfaatan.

2. Seksi Pengawasan Jalan

Menyusun petunjuk teknis pengawasan jalan.

3. Seksi Pemanfaatan Jalan

Menyusun bahan kajian dan petunjuk teknis pemanfaatan jalan.

2.4. Aspek Kegiatan Instansi

Rencana kerja Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat disesuaikan dengan kebijaksanaan umum dari pemerintah pusat, c. q Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah maupun Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk menunjang kegiatan pembangunan sosial ekonomi dalam pengembangan prasarana fisik, mengingat sektor perhubungan memegang peranan penting, Dinas Bina Marga melakukan kegiatan antara lain memperlancar arus barang dan jasa, memperlancar hubungan antara daerah produsen dengan daerah konsumen serta hubungan antara desa dan kota, mengembangkan hubungan dari atau ke daerah produksi yang terpencil yang berpotensi tinggi, memperlancar jalannya roda pemerintah, memperlancar dan mempertinggi tingkat pertahanan dan keamanan. Untuk realisasinya dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan jalan dan jembatan dengan maksud mempertahankan kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap.
2. Peningkatan dan perbaikan jalan.
3. Peningkatan dan perbaikan jembatan serta gorong-gorong.
4. Mengadakan peralatan penunjang prasarana jalan, seperti jembatan Bailey, peralatan laboratorium serta pemeliharaan peralatan penunjang untuk penyelidikan bahan tanah dan jalan.
5. Penanggulangan bencana alam.